

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan perkembangan ekonominya pada tingkat nasional sangat ditentukan pada upaya setiap daerah mengelola perekonomian di wilayahnya. Penerapan asas desentralisasi memberi kewenangan yang luas pada pemerintah kabupaten dan kota untuk menjalankan otonomi daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang lebih mandiri. Kewenangan yang dimiliki daerah bukan hanya berkaitan dengan administrasi pemerintahan, tetapi juga mencakup pengelolaan keuangan daerah secara transparan, tepat, serta akuntabel. Berdasar pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, penguatan desentralisasi fiskal diarahkan pada peningkatan independensi fiskal daerah dengan memaksimalkan pendapatan daerah serta peningkatan kualitas belanja daerah guna mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Bahasoan et al. (2024) menyebutkan bahwasanya otonomi daerah yaitu implementasi dari prinsip desentralisasi yang dipakai di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, salah satu indikator utama keberhasilan pengelolaan keuangan daerah yaitu sejauh mana kebijakan fiskal mampu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi. Pemerintah daerah bukan sekadar dituntut untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga memastikan bahwasanya setiap kebijakan anggaran yang dirumuskan memberi dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penguatan

kapasitas fiskal melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan serta pengalokasian belanja yang produktif pada akhirnya bermuara pada tujuan utama pembangunan daerah, yaitu terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta inklusif.

Menurut Sukirno (2016:9), pertumbuhan ekonomi dimaknai sebagai proses meningkatnya kegiatan ekonomi yang menunjukkan berkembangnya kuantitas barang serta jasa yang bisa didapat masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi menandakan perkembangan kemampuan produksi pada suatu wilayah, yang terlihat dari kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara bertahap. Selanjutnya, Badan Pusat Statistik Kota Kediri tahun 2025 menjelaskan bahwasanya PDRB yaitu akumulasi nilai tambah atas seluruh aktivitas ekonomi di suatu wilayah selama rentang waktu tertentu. Dengan begitu, perkembangan PDRB bisa dipakai untuk menggambarkan kondisi serta arah pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Informasi pada laman resmi Pemerintah Kota Kediri (<https://kedirikota.go.id/>) mempublikasikan bahwasanya Kota Kediri menjadi salah satu kota di Provinsi Jawa Timur yang menyimpan potensi besar pada sektor industri, perdagangan, serta pengembangan usaha. Potensi tersebut tercermin dari upaya pemerintah daerah guna mendorong pengembangan sektor industri kecil dan menengah serta peningkatan kapasitas perdagangan lokal sebagai salah satu pilar perekonomian daerah. Aktivitas ekonomi yang berkembang pada beberapa sektor tersebut berperan pada pembentukan PDRB Kota Kediri.

Tabel 1.1 Perkembangan PDRB ADHK Kota Kediri Tahun 2010-2024

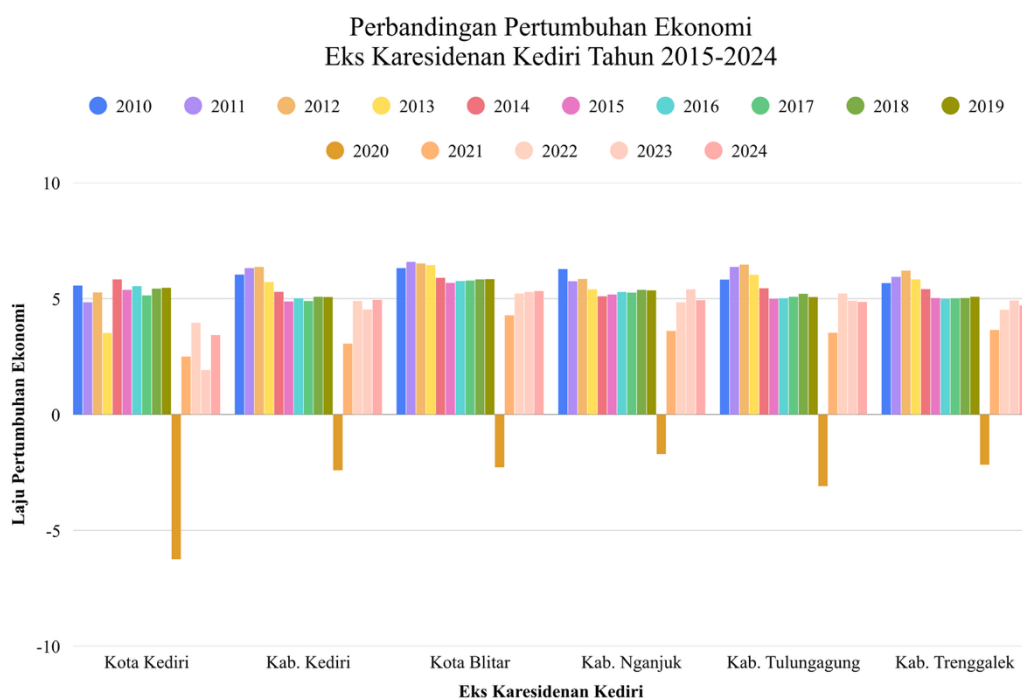
TAHUN	PDRB ADHK	Laju Pertumbuhan (%)
2010	57.247,10	5,57
2011	60.020,07	4,84
2012	63.185,08	5,27
2013	65.406,97	3,52
2014	69.220,00	5,83
2015	72.945,53	5,36
2016	76.988,36	5,54
2017	80.946,16	5,14
2018	85.337,68	5,43
2019	90.001,52	5,47
2020	84.374,98	-6,25
2021	86.485,59	2,50
2022	89.907,21	3,96
2023	91.631,35	1,92
2024	94.774,08	3,43

Sumber: BPS Kota Kediri, data diolah (2026)

(Miliar Rp)

Pada Tabel 1.1 mengindikasikan pertumbuhan ekonomi Kota Kediri periode 2010–2024 memperlihatkan tren yang beragam. Pada kurun waktu 2010–2014, pertumbuhan ekonomi menunjukkan perubahan setiap tahunnya dengan nilai yang tidak konstan. Selanjutnya, pada periode 2015–2019, pertumbuhan ekonomi berada di kondisi yang cukup stabil di kisaran 5%. Tetapi tahun 2020, terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yaitu -6,25% karena diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang berimplikasi pada berbagai sektor ekonomi. Pada periode 2021–2024, pertumbuhan ekonomi kembali menunjukkan kondisi yang membaik dengan nilai yang kembali positif meskipun masih mengalami perubahan antar tahun. Kondisi ini mencerminkan bahwasanya pertumbuhan ekonomi Kota Kediri dipicu adanya berbagai faktor ekonomi yang terjadi secara berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi Kota Kediri meningkat secara bertahap dengan adanya dorongan dari sektor industri, perdagangan, serta pengembangan usaha. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwasanya aktivitas ekonomi pada Kota Kediri mengalami fluktuasi pada periode tertentu. Kondisi tersebut mendorong perlunya perbandingan dengan daerah lain yang berada di wilayah eks Karesidenan Kediri untuk melihat perbedaan pola pertumbuhan ekonomi yang terjadi.



Sumber: BPS Eks Karesidenan Kediri

**Gambar 1.1 Grafik Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi
Eks Karesidenan Kediri Tahun 2010-2024**

Berdasar pada Gambar 1.1, laju pertumbuhan ekonomi Kota Kediri dibandingkan dengan daerah lain di eks Karesidenan Kediri selama 2010–2024 mencerminkan perbedaan yang cukup jelas. Pada periode sebelum pandemi, pertumbuhan ekonomi Kota Kediri berada pada tingkat yang cukup tinggi dan

mampu bersaing dengan Kabupaten Kediri serta Kota Blitar, sementara Kabupaten Nganjuk, Tulungagung, serta Trenggalek cenderung mempunyai laju pertumbuhan yang lebih rendah serta stabil. Namun, pada tahun 2020 Kota Kediri mengalami kontraksi ekonomi paling dalam dibandingkan daerah lainnya, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai sekitar -6%, sedangkan daerah lain mengalami penurunan yang relatif lebih kecil. Setelah itu, pada periode 2021–2024 seluruh daerah kembali mencatat pertumbuhan ekonomi positif, termasuk Kota Kediri yang menunjukkan pemulihan ekonomi secara bertahap meskipun tidak selalu menjadi yang tertinggi dibandingkan wilayah lain. Kondisi tersebut menunjukkan bahwasanya Kota Kediri mempunyai potensi pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, tetapi juga cenderung lebih sensitif terhadap guncangan ekonomi dibandingkan daerah lain di eks Karesidenan Kediri.

Terjadinya fluktuasi dalam pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kapabilitas pemerintah daerah dalam mengoptimalkan berbagai sumber pendapatannya. Pajak daerah termasuk sebagai salah satu unsur dalam PAD. Mardiasmo (2018:14) berpendapat bahwasanya pajak daerah dipahami sebagai iuran wajib bagi wilayah yang dipungut berdasarkan undang-undang serta diperuntukkan membiayai keperluan daerah. Oleh sebab itu, pajak daerah berperan penting pada pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan, sehingga tingkat realisasinya bisa mencerminkan kapasitas fiskal daerah.

Tabel 1.2 Realisasi Pajak Daerah Kota Kediri Tahun 2010-2024

Tahun	Pajak Daerah	Laju Pertumbuhan (%)
2010	16.923.398.166,00	51,96
2011	25.661.100.000,00	51,63
2012	35.750.228.963,39	39,32
2013	57.840.761.515,71	61,79
2014	68.984.386.098,43	19,27
2015	70.437.104.843,27	2,11
2016	87.639.179.630,00	24,42
2017	111.470.000.000,00	27,19
2018	110.112.983.000,00	-1,22
2019	115.891.296.479,41	5,25
2020	112.204.944.288,62	-3,18
2021	115.831.411.160,00	3,23
2022	137.509.757.025,00	18,72
2023	139.662.962.028,00	1,57
2024	149.065.798.766,00	6,73

Sumber: BPS dan BPPKAD Kota Kediri, data diolah (2026)

Berdasar pada Tabel 1.2, realisasi pajak daerah Kota Kediri selama periode 2010–2024 secara umum menunjukkan tren meningkat, meskipun laju pertumbuhannya berfluktuasi. Pada awal periode, yaitu tahun 2010 hingga 2013, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dengan pertumbuhan tinggi, terutama pada tahun 2013 yaitu 61,79%. Selanjutnya pada tahun 2014 hingga 2017, penerimaan pajak tetap meningkat namun dengan pertumbuhan yang mulai melambat. Pada tahun 2018 terjadi penyusutan sebesar 1,22% serta kembali mengalami penyusutan pada 2020 sebesar 3,18%. Setelah itu, penerimaan pajak daerah kembali meningkat pada periode 2021 hingga 2024, dengan peningkatan tertinggi tercatat pada 2022 sebesar 18,72%. Hingga tahun 2024, realisasi pajak daerah mencapai Rp149,06 miliar dengan pertumbuhan sebesar 6,73%, yang menunjukkan bahwasanya meskipun secara jangka

panjang mengalami peningkatan, pertumbuhannya masih tidak stabil dari tahun ke tahun.

Pemerintah daerah juga mendapat penerimaan dari retribusi daerah sebagai sumber PAD. Berlandaskan Peraturan Pemerintah (PP) No 35 Tahun 2023 mengenai Ketentuan Umum Pajak Daerah serta Retribusi Daerah, retribusi daerah dimaknai sebagai pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah selaku imbalan atas layanan khusus atau penerbitan izin tertentu yang secara rinci disediakan oleh pemerintah guna keperluan individu atau badan. Retribusi daerah tidak sekadar menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah, namun juga mendukung aktivitas ekonomi melalui penyediaan layanan publik serta fasilitas usaha. Peningkatan penerimaan retribusi daerah memperkuat kapabilitas fiskal pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 1.3 Realisasi Retribusi Daerah Kota Kediri Tahun 2010-2024

Tahun	Retribusi Daerah	Laju Pertumbuhan (%)
2010	10.084.030.919,94	3,56
2011	10.346.919.899,00	2,61
2012	1.347.499.790,84	-86,98
2013	9.631.747.601,76	614,79
2014	8.469.711.723,00	-12,06
2015	9.445.300.595,00	11,52
2016	9.989.929.180,00	5,77
2017	10.509.049.280,00	5,20
2018	11.662.528.000,00	10,98
2019	11.991.620.400,00	2,82
2020	10.293.135.650,00	-14,16
2021	10.185.300.710,00	-1,05
2022	25.328.365.948,00	148,69
2023	16.044.421.699,00	-36,65
2024	35.414.267.279,11	120,68

Sumber: BPS dan BPPKAD Kota Kediri, data diolah (2026)

Berdasar pada Tabel 1.3, realisasi retribusi daerah Kota Kediri periode 2010–2024 memperlihatkan kondisi yang tidak stabil. Pada tahun 2010 hingga 2011 terjadi peningkatan dengan pertumbuhan yang kecil, namun pada tahun 2012 mengalami penyusutan sangat besar sebesar -86,98% dan kemudian mengalami peningkatan pada 2013 sebesar 614,79%. Tahun 2014 kembali menurun sebesar -12,06%, lalu pada periode 2015 hingga 2019 mengalami peningkatan secara bertahap. Pada tahun 2020 dan 2021 terulang penyusutan sebesar -14,16% dan -1,05%. Selanjutnya pada tahun 2022 meningkat sebesar 148,69%, tetapi pada tahun 2023 menurun sebesar -36,65%, serta pada tahun 2024 kembali naik sebesar 120,68%. Keadaan tersebut mengindikasikan penerimaan retribusi daerah cenderung berubah-ubah setiap tahun.

Peran PAD dalam menunjang kapabilitas fiskal bukan hanya tercermin dari pajak dan retribusi daerahnya, melainkan juga dari kinerja badan usaha yang dimiliki oleh otoritas daerah. Berdasar pada Peraturan Pemerintah (PP) No 54 Tahun 2017 mengenai Badan Usaha Milik Daerah, BUMD yaitu entitas yang seluruh atau mayoritas modal yang dimiliki berada dalam kepemilikan daerah melalui penyertaan modal. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, BUMD memanfaatkan potensi secara tepat serta efisien guna kegiatan usaha bisa berjalan optimal. Dari aktivitas tersebut, perusahaan daerah mendapat hasil usaha yang tercermin dalam laba. Hidayat (2020) menyatakan bahwasanya laba menjadi ringkasan hasil bersih kegiatan operasional entitas selama kurun waktu tertentu yang disajikan dalam aspek keuangan. Laba yang dihasilkan BUMD kemudian disetorkan kepada pemerintah daerah dan dalam

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dicatat sebagai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Oleh sebab itu, laba BUMD bisa dipandang sebagai indikator keberhasilan pengelolaan perusahaan daerah dalam mencapai tujuan ekonomi sekaligus memenuhi amanah publik.

Tabel 1.4 Realisasi Laba BUMD Kota Kediri Tahun 2010-2024

Tahun	Lab a BUMD	Laju Pertumbuhan (%)
2010	1.212.138.061,13	4,49
2011	1.650.954.033,77	36,20
2012	1.347.499.790,84	-18,38
2013	587.390.769,02	-56,41
2014	785.635.046,99	33,75
2015	997.859.588,73	27,01
2016	1.517.999.710,00	52,13
2017	1.995.845.160,00	31,48
2018	1.539.840.700,00	-22,85
2019	1.513.099.400,00	-1,74
2020	1.209.685.600,00	-20,05
2021	701.149.136,05	-42,04
2022	1.981.685.048,00	182,64
2023	2.045.144.582,00	3,20
2024	2.800.182.066,32	36,92

Sumber: BPS dan BPPKAD Kota Kediri, data diolah (2026)

Berdasar pada Tabel 1.4, realisasi laba BUMD Kota Kediri selama periode 2010–2024 menunjukkan kondisi yang tidak stabil. Pada tahun 2010 hingga 2011 terjadi kenaikan, tetapi di tahun 2012 dan 2013 mengalami penyusutan sebesar -18,38% dan -56,41%. Pada tahun 2014 hingga 2017 laba BUMD kembali meningkat secara bertahap, kemudian pada tahun 2018 dan 2019 kembali menurun sebesar -22,85% dan -1,74%. Penurunan berlanjut pada tahun 2020 dan 2021 sebesar -20,05% dan -42,04%. Selanjutnya pada tahun 2022 meningkat sebesar 182,64%, dan masih mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 3,20% serta tahun 2024

sebesar 36,92%. Hal itu menunjukkan bahwasanya laba BUMD cenderung berubah-ubah setiap tahunnya dan dipicu oleh situasi ekonomi, serta kinerja perusahaan daerah.

Belanja modal dimaknai sebagai salah satu bagian belanja daerah yang berperan guna mendorong pembangunan jangka panjang. Mardiasmo, (2018:213) memaknai belanja modal sebagai pengeluaran yang kegunaannya melampaui satu tahun fiskal, yang dipakai untuk meningkatkan kepemilikan pemerintah, serta pada periode berikutnya akan berdampak pada peningkatan anggaran berkala guna operasional dan pemeliharannya. Oleh sebab itu, alokasi belanja modal mencirikan komitmen pemerintah daerah pada peningkatan daya dukung pelayanan publik sekaligus menunjang aktivitas ekonomi. Belanja modal dipandang sebagai bentuk pengeluaran pemerintah yang bisa menunjang pertumbuhan ekonomi dalam bentuk pembangunan infrastruktur serta penyediaan sarana penunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Semakin optimal realisasi belanja modal, maka semakin besar pula potensi daerah guna menciptakan aktivitas ekonomi yang produktif serta berkelanjutan.

Tabel 1.5 Realisasi Belanja Modal Kota Kediri Tahun 2010-2024

Tahun	Belanja Modal	Laju Pertumbuhan (%)
2010	158.431.307.643,00	-24,00
2011	113.617.154.821,00	-28,29
2012	189.845.554.528,00	67,09
2013	124.498.555.620,00	-34,42
2014	153.549.052.146,00	23,33
2015	174.462.849.355,00	13,62
2016	381.845.509.730,00	118,87
2017	243.195.558.130,00	-36,31

Tahun	Belanja Modal	Laju Pertumbuhan (%)
2018	133.226.151.030,00	-45,22
2019	182.759.961.090,00	37,18
2020	98.314.709.090,00	-46,21
2021	104.583.930.000,00	6,38
2022	169.126.180.227,00	61,71
2023	198.705.950.406,00	17,49
2024	152.123.432.240,00	-23,44

Sumber: BPS dan BPPKAD Kota Kediri, data diolah (2026)

Berdasar pada Tabel 1.5, realisasi belanja modal Kota Kediri periode 2010–2024 mencerminkan kondisi yang tidak stabil. Tahun 2010 hingga 2011 terjadi penyusutan sebesar -24,00% dan -28,29%, kemudian bertumbuh pada tahun 2012 sebesar 67,09% sebelum kembali melemah pada tahun 2013 sebesar -34,42%. Tahun 2014 hingga 2016 mengalami peningkatan berturut-turut sebesar 23,33%, 13,62%, dan 118,87%, lalu pada tahun 2017 dan 2018 kembali menurun sebesar -36,31% dan -45,22%. Pada tahun 2019 meningkat sebesar 37,18%, namun kembali menurun pada tahun 2020 sebesar -46,21%. Kemudian di tahun 2021 meningkat sebesar 6,38% dan kembali naik pada tahun 2022 dan 2023 sebesar 61,71% dan 17,49%, sebelum akhirnya menurun lagi pada tahun 2024 sebesar -23,44%. Keadaan tersebut mengindikasikan realisasi belanja modal di Kota Kediri cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun.

Kebijakan fiskal pemerintah sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, baik sisi penerimaan maupun pengeluaran. Pajak daerah, retribusi daerah, serta laba BUMD ialah komponen penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Sementara itu, belanja modal berperan strategis guna menunjang pembangunan infrastruktur serta aktivitas

ekonomi produktif. Namun demikian, fluktuasi pada komponen-komponen tersebut menciptakan pertanyaan terkait sejauh mana kebijakan fiskal daerah secara nyata bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri.

Dari permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, terlihat adanya ketidaksesuaian antara konsep teoritis dengan kondisi empiris yang terjadi di Kota Kediri. Secara teori, kenaikan perolehan daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, serta laba BUMD seharusnya mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah sesuai dengan PMK Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2023, yaitu kemampuan keuangan daerah yang dinilai dari pendapatan daerah maupun penerimaan pendanaan setelah dikurangkan pada komponen pendapatan, belanja, serta pengeluaran pembiayaan tertentu. Kondisi tersebut diharapkan bisa mendorong peningkatan belanja modal yang kemudian berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Namun kenyataannya, data yang sudah dipaparkan menunjukkan bahwasanya realisasi belanja modal di Kota Kediri selama tahun 2010 hingga 2024 mendapati ketidakstabilan yang cukup signifikan. Dalam periode tertentu, terjadi perkembangan yang cukup tinggi, namun di tahun selanjutnya kembali terjadi penyusutan yang tajam, terutama saat periode menjelang serta saat terjadinya pandemi COVID-19.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Kediri juga tidak selalu bergerak searah dengan perubahan pada komponen penerimaan maupun belanja modal. Terdapat periode di mana penerimaan daerah mengalami peningkatan, namun pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan kenaikan

yang signifikan. Sebaliknya, terdapat pula kondisi ketika belanja modal mengalami kenaikan, tetapi tidak diiringi oleh pertumbuhan ekonomi yang sebanding. Kondisi tersebut mengindikasikan hubungan antara kapasitas fiskal serta pertumbuhan ekonomi tidak selalu berjalan secara searah. Fluktuasi pada pajak daerahnya, retribusi daerah, laba BUMD, serta belanja modal mengindikasikan bahwasanya pengelolaan kebijakan fiskal daerah masih menghadapi beragam kendala, baik yang dipicu oleh faktor internal seperti efektivitas perencanaan dan pengalokasian anggaran, maupun faktor eksternal berupa kondisi perekonomian nasional serta dampak pandemi. Dengan demikian, diperlukan kajian empiris untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, serta belanja modal memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Adapun perbedaan hasil penelitian dari beberapa penelitian sebelumnya. Studi yang diteliti oleh Budi et al. (2021) mengungkapkan bahwasanya pajak daerah serta retribusi daerah berdampak signifikan positif pada pertumbuhan ekonominya. Hasil yang sama juga didapat Miswar et al. (2021) yang membuktikan bahwasanya pajak daerah serta retribusi daerah mempunyai dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Namun, hasil berbeda ditunjukkan oleh Idham et al. (2021) yang membuktikan bahwasanya retribusi daerah tidak berdampak pada pertumbuhan ekonominya, meskipun pajak daerah berpengaruh signifikan.

Penelitian lainnya, yaitu Siri & Ridwan (2022) menunjukkan bahwasanya pajak daerah, retribusi daerah, serta laba BUMD secara parsial

tidak berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonominya, meskipun secara simultan berpengaruh. Penelitian Utami & Masyitah (2023) juga menunjukkan bahwasanya retribusi daerah, laba BUMD, serta belanja modal tidak berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonominya, sedangkan pajak daerah berdampak signifikan. Sementara itu, penelitian Manalu et al. (2023) menunjukkan bahwasanya tidak ditemukannya pengaruh pajak daerah serta retribusi daerah pada pertumbuhan ekonominya, baik secara parsial maupun simultan. Perbedaan hasil penelitian tersebut mengindikasikan hubungan antara pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, serta belanja modal pada pertumbuhan ekonominya masih belum menunjukkan konsistensi secara empiris. Selain itu, penelitian yang berfokus mengkaji variabel-variabel tersebut pada tingkat Kota Kediri dengan periode terbaru masih terbatas. Kondisi tersebut mengindikasikan celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut guna mendapat bukti empiris yang lebih spesifik mengenai pengaruh instrumen fiskal daerah pada pertumbuhan ekonomi Kota Kediri.

Berdasar pada uraian permasalahan serta adanya perbedaan temuan yang merujuk studi sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dampak Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD, serta Belanja Modal pada Pertumbuhan Ekonomi Kota Kediri dengan memakai data yang tercantum pada LRA Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2010-2024 dan Data Pertumbuhan Ekonomi Kota Kediri Tahun 2010-2024 yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kediri. Oleh sebab itu, peneliti

tertarik untuk mengkaji lebih lanjut melalui penelitian dengan judul
**“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD, dan Belanja
 Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Kediri”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakangnya yang sudah dijabarkan, permasalahan yang bisa diidentifikasi pada penelitiannya yaitu:

1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Kediri?
2. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Kediri?
3. Apakah Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Kediri?
4. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Kediri?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah yang sudah dijabarkan, tujuan dari penelitiannya yaitu:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Kediri.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Kediri.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Kediri.

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Kediri.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Melalui penelitiannya, peneliti berharap bisa turut mendukung melalui manfaat praktis yang bisa bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi Peneliti

Melalui penelitiannya, penulis berkesempatan untuk mengembangkan serta mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang didapat selama menempuh studi. Penulis juga berharap temuan penelitiannya bisa membuka wawasan baru, baik bagi diri sendiri maupun bagi pembaca lainnya. Selain itu, penelitiannya memberi pengalaman praktis guna melakukan penelitian empiris dan menerapkan berbagai konsep yang dipelajari pada situasi nyata, sehingga mampu memperdalam pemahaman mengenai konsep-konsep ekonomi serta keuangan daerah.

2. Bagi Universitas

Pada penelitiannya, penulis berharap bisa dijadikan sebagai acuan maupun rujukan bagi studi selanjutnya, baik dari mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur maupun oleh mahasiswa dari institusi lain guna meneliti fenomena ataupun topik sejenis.

3. Bagi Masyarakat

Melalui penelitiannya, peneliti berharap bisa memberi pemahaman yang lebih menyeluruh pada masyarakat mengenai beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Kediri. Penelitian ini diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparansi dan akuntabilitas, khususnya terkait pemanfaatan pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, serta belanja modal guna mendukung pembangunan ekonominya. Dengan begitu, penelitiannya bisa menyajikan gambaran lebih jelas mengenai bagaimana penerimaan dan pengeluaran daerah berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Studi ini diharapkan bisa berkontribusi guna memperdalam wawasan mengenai teori-teori keuangan otoritas daerah, khususnya terkait pengelolaan pendapatan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, serta kontribusi laba BUMD, maupun pengelolaan belanja modal guna mendukung pembangunan ekonominya. Kontribusi tersebut dikaji dalam kerangka *Teori Kebijakan Fiskal* sebagai *grand theory*, yang menjelaskan bahwasanya kebijakan pemerintah melalui instrumen penerimaan dan pengeluaran daerah berperan dalam memengaruhi aktivitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu, penelitiannya diharapkan bisa memperluas kajian teoritis mengenai hubungan antara kapasitas fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi. Studi ini turut diharapkan mampu menyajikan

temuan empiris yang menjadi referensi dalam pengembangan ilmu, khususnya terkait efektivitas pengelolaan keuangan daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri, serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji kebijakan fiskal daerah dan pembangunan ekonomi.